

**ANALISIS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN BARANG  
AKSESORIS ALAT KOMUNIKASI ELECTRONIC IMPORT DI KOTA SURABAYA  
(STUDI KASUS DI PT DORAN SUKSES INDONESIA)**

<sup>1</sup>Ismail,  
<sup>2</sup>Fierda Nurany,  
<sup>3</sup>Kristian Haba Kodi

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Bhayangkara Surabaya

email:  
fierdanurany@ubhara.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam pelaksanaan pelayanan pengawasan Barang import Aksesoris Alat Komunikasi Electronic di PT Doran Sukses Indonesia. Peran kepolisian sangat penting sebagai lembaga penegak hukum dan keamanan negara. Kepolisian memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan negara dari ancaman kejahatan, termasuk kejahatan yang terkait dengan impor barang, Brand JETE milik dari PT Doran Sukses Indonesia, kemudian Menjadi faktor utama dalam penelitian ini. Serta factor penghambat pelaksanaan kebijakan sistem ini, dan upaya dalam menangani faktor penghambat Barang Aksesoris Alat Komunikasi Electronic di Kota Surabaya oleh kepolisian Dengan cara Memberikan Pelatihan dan Peningkatan Pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah kepolisian yang menjadi pelaksana, informan serta pegawai di PT Doran Sukses Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara secara langsung dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Peran Kepolisian Dalam Pengawasan Barang Aksesoris Alat Komunikasi Electronic Import di PT.Doran Sukses Indonesia dengan beberapa upaya yaitu: upaya Pre-emptif, Upaya Preventif, Upaya Represif. Penelitian ini menemukan faktor penghambat Peran Kepolisian dalam Pengawasan Barang Aksesoris Alat Komunikasi Electronic Import di PT.Doran Sukses Indonesia yaitu keterbatasan sumber daya manusia, wewenang yang terbatas pada aturan yang telah ditetapkan dengan sedikit fleksibilitas. Mengatasi hal tersebut, kepolisian terus menerus melakukan pelatihan dan kerjasama antarlembaga yang dapat meningkatkan kompetensi sumber dayanya.

**Kata Kunci :** *penegakan polisi, pemberdayaan, supremasi hukum, keamanan perdagangan*

**ABSTRACT**

This research is aimed at knowing the role of the police in implementing the monitoring service for imported goods, accessories, electronic communication devices at PT Doran Sukses Indonesia. The role of the police is very important as a law enforcement and state security agency. The police have the duty and responsibility to protect the public and the nation from the threat of crime, including crimes related to the import of goods, the JETE Brand owned by PT Doran Sukses Indonesia, which later became the main factor in this research. As well as the inhibiting factors for the implementation of this system policy, and efforts to deal with the inhibiting factors for electronic communication equipment accessories in the city of Surabaya by the police by providing training and increasing knowledge. The research method used is a

type of qualitative research. The informants in this study were the police who were executors, informants and employees at PT Doran Sukses Indonesia. Data collection techniques used are direct interviews and documentation. The techniques used in data analysis are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that: The Role of the Police in Controlling Imported Electronic Communication Equipment Accessories at PT. Doran Sukses Indonesia with several efforts, namely: Pre-emptive efforts, Preventive Efforts, Repressive Efforts. This study found the inhibiting factors for the role of the National Police in Supervision of Imported Electronic Communication Equipment Accessories at PT. Doran Sukses Indonesia, namely limited human resources, authority limited to predetermined rules with little flexibility. Overcoming this, the National Police continuously conducts training and inter-agency collaboration that can improve the competence of its resources.

**Keywords :** *police enforcement, empowerment, rule of law, trade security*

---

## PENDAHULUAN

Impor dapat diartikan sebagai pembelian barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri dengan perjanjian kerjasama antara dua negara atau lebih. Impor juga bisa dikatakan sebagai perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Impor adalah proses secara legal, transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain umumnya dalam proses perdagangan. Menurut Purwito, Ali., (2015) Impor merupakan kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintasi batas Negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean seperti, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Pada tahun 2017 sendiri, telah ditemukan penjualan barang impor dengan jenis speaker sebanyak 20 unit, dimana pelaku usaha telah melanggar ketentuan tidak memiliki sertiifkat atau penyelenggara telekomunikasi. Hal ini tentu saja melanggar

pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf "a" UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 22 Jo.

PT. Doran Sukses Indonesia yang bergerak di bidang penyedia aksesoris dan wearable gadget terkemuka di Indonesia. Didirikan oleh Jhonny Thio Doran pada tanggal 25 Desember 2009. Pada awalnya, bisnis ini merupakan usaha yang dijalankan oleh Jhonny Thio Doran melalui kamar kost adalah menjual sedikit demi sedikit produknya. Caranya produk aksesoris dan wearable gadget di forum forum seperti Kaskus secara online. Kepolisian memiliki peran penting dalam pengawasan barang impor pada PT.Doran Sukses Indonesia import barang elektronik. Beberapa peran utama kepolisian dalam hal ini antara lain:

1. Memastikan keamanan dan keselamatan barang elektronik yang di import PT. Doran Sukses Indonesia, Kepolisian untuk memastikan bahwa barang dan bertanggung jawab barang impor yang masuk ke PT. Doran Sukses Indonesia aman dan tidak membahayakan masyarakat.

2. Mencegah peredaran barang ilegal pada PT.Doran Sukses Indonesia, Kepolisian dapat membantu pihak bea cukai dalam mengidentifikasi barang barang ilegal atau yang tidak memiliki izin impor yang diperlukan.
3. Mengawasi distribusi barang pada PT.Doran Sukses Indonesia, Kepolisian dapat membantu memantau distribusi barang impor eletronic pada PT.Doran Sukses Indonesia untuk memastikan bahwa barang tersebut disalurkan ke tempat yang tepat dan tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.
4. Melakukan penyidikan pada PT.Doran Sukses Indonesia, Jika terdapat indikasi bahwa PT.Doran Sukses Indonesia mengimpor barang dengan cara yang tidak benar atau melanggar hukum.
5. Dengan ini PT.Doran Sukses Indonesia bekerja sama dengan kepolisian untuk memastikan bahwa barang impor yang masuk ke PT.Doran Sukses Indonesia dalam pengawasan Patroli, demi memperlancar perjalanan kontener yang menuju PT.Doran aman dan tidak melanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peran Kepolisian Dalam Pengawasan Barang import memiliki Pelayanan publik yang merupakan sebuah kebijakan atau wadah yang di buat oleh pemerintah dalam rangka memberikan service kepada masyarakat luas dan perusahaan dan wirausahaan dalam rangka peran kepolisian dalam pengawasan barang import. Kadang pelayanan publik ini mempunyai masalah

terkait kualitasnya yang berbeda antara satu instansi pelayanan publik dengan instansi yang lain sehingga menyebabkan kegagalan dalam penerapannya (Irianto et al., 2022; Kurniawan & Nurany, 2022; T Prasetyowati & Nurany, 2022).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Peran Kepolisian Dalam Pengawasan Barang Aksesoris Alat Komunikasi Electronic Import di PT.Doran Sukses Indonesia Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat POLRI merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Lalu, bagaimanakan peran POLRI guna menjaga keamanan di dalam negeri. Kepolisian dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat akan kepentingannya dalam menyampaikan pendapat di muka umum dengan sasaran yang dikehendakinya dengan berbagai upaya di bawah ini :

### **A. Upaya Pre-emptif**

Kepolisian memiliki peran penting dalam pengawasan pre emptif, yaitu mengidentifikasi dan mencegah kejahatan sebelum terjadi. Berikut adalah beberapa peran utama Kepolisian dalam pengawasan pre-emptif : Mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen, Melakukan patroli dan pengawasan, Melakukan

tindakan pencegahan, Kerjasama dengan pihak-pihak terkait, Menegakkan hukum secara tegas.

Secara keseluruhan, peran Kepolisian dalam pengawasan pre-emptif sangat penting dalam memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat. Kepolisian harus mampu mengidentifikasi potensi ancaman keamanan dan melakukan tindakan pencegahan yang tepat untuk mencegah terjadinya kejahatan.

### **B. Upaya Preventif**

Kepolisian memiliki peran penting dalam pengawasan preventif, yaitu mencegah terjadinya kejahatan dengan cara menekan faktor faktor yang dapat memicu terjadinya kejahatan. Berikut adalah beberapa peran utama Kepolisian dalam pengawasan preventif : Menjaga ketertiban umum, Meningkatkan kesadaran masyarakat, Mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah keamanan, Menegakkan hukum secara adil dan proporsional.

Secara keseluruhan, peran Kepolisian dalam pengawasan preventif sangat penting dalam memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat. Kepolisian harus mampu menekan faktor terjadi faktor yang dapat memicu nya kejahatan dan memperkuat jaringan keamanan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

### **C. Upaya Represif**

Kepolisian memiliki peran penting dalam pengawasan represif, yaitu menindak dan menangkap pelaku kejahatan yang telah

melakukan tindakan kriminal. Berikut adalah beberapa peran utama Kepolisian dalam pengawasan represif : Identifikasi dan penyelidikan kejahatan, Penangkapan pelaku kejahatan, Penyitaan barang bukti, Menjaga keamanan dan ketertiban selama proses hukum, Mencegah balas dendam.

Secara keseluruhan, peran Kepolisian dalam pengawasan represif sangat penting dalam menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kepolisian harus dapat mengidentifikasi kejahatan, menangkap pelaku kejahatan, menyita barang bukti, menjaga keamanan selama proses hukum, dan mencegah balas dendam untuk memastikan berjalan dengan adil dan lancar.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah sistem logis metodis yang diselesaikan untuk mendapatkan informasi yang sepenuhnya bertujuan untuk mencatat masalah yang disajikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena ingin menjelaskan masalah secara deskriptif tentang peran kepolisian dalam pengawasan barang aksesoris alat komunikasi electronic import di PT.Doran Sukses Indonesia. Fokus penelitian mengenai peran kepolisian dalam pengawasan barang import pada PT.Doran Sukses Indonesia dapat membahas beberapa aspek yang terkait dengan hal tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dokumentasi (Creswell, 2015). Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa aktivitas

analisis kualitatif data dilakukan secara interaktif dan terjadi secara terus menerus secara mendalam, sehingga data jenuh. Kegiatan dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, pengurangan data (pengurangan data), tampilan data (presentasi data) dan gambar / verifikasi kesimpulan (kesimpulan gambar dan verifikasi) (Miles et al., 2014).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1) Peran Kepolisian dalam Pengawasan barang impor oleh PT. Doran Sukses Indonesia

Dengan demikian Polisi memiliki peran yang penting dalam pengawasan di Surabaya pusat import di Indonesia (Soejono Sukanto (2009). Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan (Sarjiyanto, 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung, transaksi rahasia maupun terang untuk melakukan dengan terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang. Pungli dalam pengawasan barang import sangat merugikan pihak perusahaan karena biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih tinggi dan proses pengawasan menjadi lebih lambat. Hal ini juga dapat berdampak kualitas barang impor yang diterima oleh PT.Doran Sukses Indonesia.

### A. Upaya Pre-emptif

Kepolisian memiliki peran penting dalam pengawasan pre-emptif, yaitu mengidentifikasi dan mencegah kejahatan sebelum terjadi. Berikut adalah beberapa peran utama Kepolisian dalam Pengawasan Pre-emptif :

1. Mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen. Mengumpulkan informasi intelijen tentang barang impor dari berbagai sumber. Kami memantau laporan perdagangan internasional, membaca publikasi industri, mengumpulkan data statistik, dan melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data langsung dari sumbernya.
2. Melakukan patroli dan pengawasan. melakukan patroli dan pengawasan adalah mencegah masuknya barang barang yang berbahaya atau ilegal ke dalam negara, mengurangi risiko keamanan bagi masyarakat, dan melindungi hak kekayaan intelektual dan keuntungan ekonomi negara. Patroli dan pengawasan juga membantu mendorong perdagangan yang sehat dan adil dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan yang berlaku.
3. Melakukan tindakan pencegahan. seperti melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang masuk ke dalam pelabuhan, bandara, atau titik masuk lainnya, melakukan pengujian untuk memastikan keamanan, kualitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, melakukan

pemeriksaan fisik dan pengujian laboratorium, dan melakukan tindakan penegakan hukum jika ditemukan barang yang melanggar aturan (Sapardi, 2021).

4. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Kepolisian dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti pihak keamanan swasta, lembaga pemerintah, dan masyarakat, untuk memperkuat pengawasan pre-emptif.
5. Menegakkan hukum secara tegas. Tindakan tegas yang biasa dilakukan terkait barang import antara lain penggeledahan, penyitaan, penangkapan, pengadilan, dan tindakan hukum lainnya yang diatur dalam undang-undang terkait barang impor.

#### B. Upaya Preventif

Kepolisian memiliki peran penting dalam pengawasan preventif, yaitu mencegah terjadinya kejahatan dengan cara menekan faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kejahatan. Berikut adalah beberapa Kepolisian dalam pengawasan preventif :

1. Menjaga Ketertiban Umum. Perlu memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proses impor mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap pelabuhan dan tempat-tempat lain yang menjadi pintu masuk barang impor. Jika ditemukan adanya barang yang tidak layak atau berbahaya

bagi masyarakat, maka harus segera dilakukan tindakan yang diperlukan (Rinaldy et al., 2021).

2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang barang import karena banyak masyarakat yang masih kurang paham akan bahaya dan risiko dari barang impor yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, kita dapat memastikan bahwa masyarakat dapat memilih barang impor yang aman dan berkualitas.
3. Menegakkan hukum secara adil dan proporsional. Proses penegakan hukum terkait pengawasan barang import dimulai dari pemeriksaan dan pengujian terhadap barang impor, apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka dilakukan pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan dan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan atau melakukan perbaikan. Jika pelanggaran tersebut masih berlanjut, maka sanksi yang sesuai akan diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### C. Upaya Represif

Kepolisian memiliki peran penting dalam pengawasan represif, yaitu menindak dan menangkap pelaku kejahatan yang telah melakukan tindakan kriminal. Berikut adalah beberapa peran utama Kepolisian dalam pengawasan represif :

1. Identifikasi dan penyelidikan kejahatan. Tindakan-tindakan jika terbukti adanya

penyelundupan atau penggelapan barang import akan adanya penahanan atau penangkapan terhadap pelaku, seperti pemalsuan dokumen, tujuan tersebut adalah untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan negara serta masyarakat.

2. Penangkapan pelaku kejahatan. Jika ada ketidaksesuaian atau kecurigaan, pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memastikan keamanan barang tersebut.
3. Penyitaan barang bukti. Jika ditemukan adanya indikasi kejahatan terkait pengawasan barang impor, maka akan segera melakukan penyelidikan lebih lanjut penyitaan barang bukti dan kemudian akan di tegakkan hukum yang sesuai (Anjarwi & SE, 2021).
4. Menjaga keamanan dan ketertiban selama proses hukum. Selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kejaksaan atau pengadilan untuk memastikan bahwa segala tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
5. Mencegah balas dendam. Kepolisian selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa proses pengawasan berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan dampak buruk pada pihak-pihak yang terlibat (Tri Prasetyowati et al., 2023).

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa kepolisian selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa proses pengawasan berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan dampak buruk pada pihak-pihak yang terlibat.

## **2) Faktor penghambat Peran Kepolisian dalam Pengawasan Barang import di PT.Doran Sukses Indonesia**

Meskipun peran kepolisian dalam pengawasan barang impor pada PT.Doran Sukses Indonesia sangat penting, namun terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat menghambat efektivitas peran mereka, di antaranya adalah :

### **A. Keterbatasan sumber daya**

Salah satu faktor penghambat yang dapat mempengaruhi efektivitas peran kepolisian dalam pengawasan barang import pada PT.Doran Sukses Indonesia adalah keterbatasan sumber daya. Beberapa contoh keterbatasan sumber daya yang dapat mempengaruhi peran kepolisian dalam hal ini antara lain:

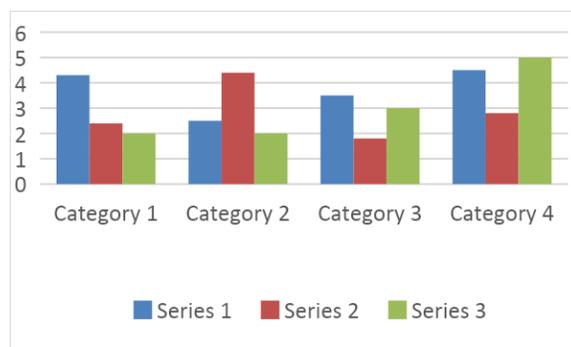
1. Keterbatasan personel Jumlah personel kepolisian yang terbatas dapat membuat mereka sulit untuk melakukan pengawasan yang efektif pada setiap perusahaan import barang elektronik. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin memiliki jaringan yang kompleks atau berada di daerah yang sulit dijangkau, sehingga membutuhkan jumlah personel yang lebih banyak untuk melakukan pengawasan (Laksono, 2021) . Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa benar kepolisian memang mengalami keterbatasan personal dalam melaksanakan tugas pengawasannya terhadap barang import tetapi bukan sebuah persoalan yang berat karena kepolisian melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait seperti Bea Cukai dan instansi.

2. Keterbatasan peralatan-Kepolisian juga memerlukan peralatan yang canggih dan modern untuk memantau dan mengawasi setiap transaksi yang terjadi. Namun, keterbatasan anggaran dapat membuat mereka sulit untuk membeli peralatan tersebut. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa Hal ini juga bisa menjadi tantangan tersendiri kepolisian dalam melakukan pengawasan terhadap barang barang yang masuk ke dalam negara, maka dari itu kepolisian melakukan beberapa upaya untuk mengatasi keterbatasan peralatan dalam proses pengawasan barang import. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti Bea Cukai untuk mengatasi keterbatasan peralatan dalam proses pengawasan barang import.
3. Keterbatasan anggaran Keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi kemampuan kepolisian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan barang impor pada sebuah perusahaan elektronik (Pakpahan et al., 2021). Hal ini dapat membatasi kemampuan

kepolisian untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan dengan lebih intensif dan cermat. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa dalam proses pengawasan barang import memiliki keterbatasan anggaran salah satu contoh paling nyata yaitu kekurangan peralatan teknologi mutakhir, keterbatasan anggaran ini juga mempengaruhi ketersediaan personal dan pelatih sehingga kepolisian masih sangat membutuhkan suport dana yang maksimal dari pemerintahan terkait (Fadli, K., Bedasari, 2022).

4. Keterbatasan waktu pengawas Tugas dan tanggung jawab kepolisian dalam pengawasan barang impor pada sebuah perusahaan elektronik sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang cukup untuk dilaksanakan (Kristinah, N., Lauren, 2021). Keterbatasan waktu dapat membuat kepolisian sulit untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal, terutama jika perusahaan tersebut beroperasi secara luas dan membutuhkan pengawasan yang berkelanjutan.



Gambar 1. Penertiban Keamanan di Pelabuhan Tanjung Perak



Gambar 2. Penjagaan Keamanan di malam hari di Pelabuhan Tanjung Perak

Keterbatasan wewenang. Kepolisian memiliki kewenangan yang terbatas dalam melakukan pengawasan barang import. Beberapa aspek pengawasan barang import memerlukan keterlibatan instansi pemerintah lain seperti Bea Cukai dan Karantina Pertanian, sehingga Kepolisian tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan tertentu terhadap barang-barang yang dicurigai ilegal. Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas barang barang impor yang masuk ke dalam suatu negara, namun kewenangan tersebut terbatas hanya pada aspek aspek keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan Demikian dapat di simpulkan bahwa PT.Doran Sukses Indonesia atau non perusahaan yang melakukan import juga harus memperhatikan aspek kriminal seperti kesehatan, lingkungan, dan hak Misalnya, pada produk makanan dan obat-obatan, kami perlu memastikan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standart kesehatan yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian untuk mengatasi hambatan pelaksanaan perannya dalam

pengawasan barang import pada PT.Doran Sukses Indonesia dan perusahaan-perusahaan yang melakukan import.

1. Pelatihan dan peningkatan pengetahuan. Pelatihan ini dapat diberikan kepada personel ke bertugas dalam pengawasan barang impor.
2. Peningkatan kerja sama antara lembaga, Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian untuk mengatasi hambatan pelaksanaan perannya dalam pelayanan pengawasan barang impor adalah dengan meningkatkan kerja sama antara lembaga. Kerja sama ini dapat dilakukan dengan instansi terkait seperti Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap barang impor.

## KESIMPULAN

Dalam pengawasan barang import pada PT.Doran Sukses Indonesia, peran kepolisian sangat penting sebagai lembaga penegak hukum dan keamanan negara. Kepolisian memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan negara dari ancaman kejahatan, termasuk kejahatan yang terkait dengan impor barang.

1. Peran Kepolisian Dalam Pengawasan Barang aksesoris Alat Komunikasi electronic import di PT.Doran Sukses Indonesia. Peran kepolisian dalam pengawasan barang import pada sebuah perusahaan (PT.Doran Sukses Indonesia) meliputi

pemeriksaan, pengawasan, dan penindakan terhadap barang impor yang melanggar regulasi atau berpotensi membahayakan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian perlu menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya, keterbatasan hukum, kurangnya koordinasi antarlembaga terkait, dan tingkat kompleksitas masalah yang dihadapi. Dapat di tarik kesimpulan oleh peneliti bahwa kepolisian yang membidangi dalam penanganan Pengawasan kegiatan dan aktivitas masyarakat secara umum baik perorangan maupun instansi, Tugas dan wewenang kelompok serta tersebut merupakan amanat merupakan salah satu tugas berat bagi yang Kepolisian dalam memberikan pengawasan terhadap barang import.

2. Faktor Penghambat terhadap barang import. Peran Kepolisian Dalam Pengawasan Barang Aksesoris Alat Komunikasi Electronic Import di PT.Doran Sukses Indonesia. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kepolisian perlu melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait, menggunakan teknologi canggih, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan melakukan evaluasi dan pengawasan internal secara teratur. Dengan

upaya-upaya tersebut, kepolisian diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta melindungi kepentingan negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwi, A., & SE, M. (2021). *Pajak Lalu Lintas Barang (Kepabeanan, Ekspor, Impor, dan Cukai)*. Deepublish. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=H7ogEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Anjarwi,+A.+W.,+%26+SE,+M.+\(2021\).+Pajak+Lalu+Lintas+Barang+\(Kepabeanan,+Ekspor,+Impor,+dan+Cukai\).+Deepublish&ots=njrivw\\_P3Z&sig=jmazWJYJ\\_99sH1cztK0\\_nyHamvQ](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=H7ogEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Anjarwi,+A.+W.,+%26+SE,+M.+(2021).+Pajak+Lalu+Lintas+Barang+(Kepabeanan,+Ekspor,+Impor,+dan+Cukai).+Deepublish&ots=njrivw_P3Z&sig=jmazWJYJ_99sH1cztK0_nyHamvQ)
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (memilih diantara lima pendekatan)*. *Penelitian Kualitatif*.
- Fadli, K., Bedasari, H. et al. (2022). Efektivitas Pengawasan Kantor Pelayanan Pengawasan Bea Dan Cukai Tipe B Dalam Mengatasi Penyeludupan Barang Ilegal. *Jurnal Kemunting*, 3(1), 675–702. <http://www.ejurnal.universitaskarimuna.ac.id/index.php/IAN/article/download/502/344>
- Irianto, H., Kurniawan, B. A., & Mulyono, A. (2022). Optimalisasi Pelayanan Untuk Mewujudkan Good Governance Di Mal Pelayanan Publik Mini Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *INTELEKTUAL ( E-Journal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi )*, 9(1), 32–40. <https://doi.org/10.55499/INTELEKTUA>

L.V9I1.67

- Kristinah, N., Lauren, B. et al. (2021). Analisis Hukum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Di Kota Batam, Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(1), 1–9. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/view/348>
- Kurniawan, B. A., & Nurany, F. (2022). *Keterkaitan Politik dengan Administrasi Pembangunan*.
- Laksono, F. (2021). *Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pelabuhan Tikus Sebagai Pintu Masuk Kejahatan (Studi Di Polsek Bantan Kabupaten Bengkalis)*. <https://repository.uir.ac.id/12402/>
- Miles, M. B., Michael Huberman, A., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis. A methods sourcebook. In *Sage Publications* (pp. 485–487).
- Pakpahan, E., Tjut, U., & Dhien, N. (2021). Pengaruh SOP Pemeriksaan Fisik Barang Impor dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean ( KPPBC TMP ) Belawan. *Jptam.Org*, 5, 5804–5810. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1873>
- Prasetijowati, T, & Nurany, F. (2022). *Pokok-Pokok Kebijakan Publik*. Alpha. <http://eprints.ubhara.ac.id/1285/>
- Prasetijowati, Tri, Nurany, F., & Rahmawati, A. L. (2023). Peran Komunikasi Organisasi Bagi Pemimpin Dalam Menangani Problem Solving Di Ukm Badminton Club Universitas Bhayangkara Surabaya. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 5(1), 73–83. <https://doi.org/10.51747/publicio.v5i1.1264>
- Purwito, Ali. Indriani. Amir, M. (2015). *Ekspor Impor Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan*. Mitra Wacana Medika. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Ali+Purwito+dan+Indriani+%282015%29&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Ali+Purwito+dan+Indriani+%282015%29&btnG=)
- Rinaldy, E., Ikhlas, D., & Utama, A. (2021). *Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi*. Bumi Aksara. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=xHxWEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Rinaldy,+E.,+Ikhlas,+D.,+%26+Utama,+A.+\(2021\).+Perdagangan+Internasional:+Konsep+dan+Aplikasi.&ots=4\\_dejMiWqM&sig=CsgabMACcrCLrIbVOZvr3YAOUzS](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=xHxWEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Rinaldy,+E.,+Ikhlas,+D.,+%26+Utama,+A.+(2021).+Perdagangan+Internasional:+Konsep+dan+Aplikasi.&ots=4_dejMiWqM&sig=CsgabMACcrCLrIbVOZvr3YAOUzS)
- Sapardi. (2021). *Ekspor Impor : Teori dan Praktikum Kegiatan Ekspor Impor untuk Praktisi Logistik dan Bisnis. 1st ed. Sleman: Deepublish*. Deepublish. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=lva7DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Supardi,+E.+\(2019\).+Ekspor+Impor:+Teori+Dan+Praktikum+Kegiatan+Ekspor+Impor+Untuk+Praktisi+Logistik+Dan+Bisnis&ots=-wHUSpR\\_aC&sig=ssIPJylCs2-TEHGvjXLC8gE9E4c](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=lva7DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Supardi,+E.+(2019).+Ekspor+Impor:+Teori+Dan+Praktikum+Kegiatan+Ekspor+Impor+Untuk+Praktisi+Logistik+Dan+Bisnis&ots=-wHUSpR_aC&sig=ssIPJylCs2-TEHGvjXLC8gE9E4c)